



USULAN KEGIATAN MENDADAK DIKUNCI

Ada Pokir, Dewan Harus Pikir-pikir

UMBULHARJO (MERAPI) - Memasuki tahun politik anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak bisa lagi main utak-atik minta titipan kegiatan atau program ke Pemkot Yogyakarta. Seluruh usulan program atau kegiatan di wilayah dari dewan telah dikunci dalam pokok pikiran (pokir) DPRD Kota Yogyakarta.

Selain itu program kegiatan diawali melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) dan dikawal lewat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

"Kalau nanti ada yang minta usulan atau titipan kegiatan dari dewan dan tidak masuk RKPD, tolong ditolak saja. Tidak usah takut. Sudah ada pokir-pokir dewan," kata Sekretaris Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Suwanto dalam Konsultasi Publik RKPD Kota Yogyakarta tahun 2019, di Balai Kota, Selasa (6/2).

Dia menjelaskan pokir-pokir itu wadah bagi seluruh anggota DPRD untuk memberikan masukan program kegiatan di wilayah. Pokir-pokir dewan itu akan dituangkan dan ditetapkan dalam surat keputusan (SK) DPRD Kota Yogyakarta. Kini dewan juga telah membentuk panitia khusus (pansus) rancangan peraturan daerah (ra-perda) pokir dewan sehingga bisa menjadi landasan dalam penyusunan kegiatan dan penganggarannya.

Suwanto yang juga Ketua Pansus Raperda Pokir menyebut sudah ada beberapa masukan dari dewan untuk pokir dewan. Seluruh masukan itu akan dicermati dan dievaluasi agar tidak tumpang tindih atau sudah di-

wan. Setiap usulan kegiatan APBD, harus disesuaikan dengan regulasi agar tidak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kita sudah tetapkan SK tata kala pokir dewan. Saya jamin tidak ada teman-teman dewan yang memotong jalan (usulan kegiatan). Itu akan merugikan karena kegiatan untuk masyarakat tapi dibelokkan untuk kegiatan kepentingan dewan," tegas Sujanarko.

Dalam konsultasi publik itu Ketua LPMK Kadipaten Kraton, Gardani menyampaikan keluhan adanya anggota dewan yang memotong kompas usulan kegiatan di wilayah. Padahal menurutnya anggota dewan itu tidak mengikuti musrenbang di tingkat kelurahan. "Tapi saat di musrenbang di kecamatan, tiba-tiba mengusulkan kegiatan yang sebelumnya, belum disepakati," ujarnya.

(Tri-m
Sekretaris



MERAPI/TRI DAMIYATI

Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi dalam kegiatan konsultasi publik untuk menyusun RKPD 2019 dan Musrenbang.

1. laksanakan sebelumnya. Pokir dewan itu akan menjadi masukan ke-eksekutif (dalam musrenbang dan penyusunan RKPD).
2. "Masukan dalam pansus pokir kebanyakan terkait usulan fisik ke Dinas PUPKP. Misalnya pembangunan talud di wilayah. Target kami pokir selesai bulan ini karena Musrenbang diadakan Maret," paparnya.
3. Ketua DPRD Kota Yogyakarta Sujanarko mengakui sebelum ada pokir dewan, dimungkinkan titip kegiatan dari dewan ke program pemkot masih terjadi. Dengan adanya pokir hal itu tidak dapat dilakukan lagi. Pihaknya menegaskan dewan akan berkomitmen menempuh jalur yang benar dalam usulan program wilayah lewat pokir de-

Lanjut

itanggapi

iketahui

Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005